



**PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, EVALUASI
ANGGARAN DAN SISTEM PELAPORAN
TERHADAP AKUNTABILITAS PADA
PEMERINTAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

SYAHNA ZATIRA

NPM 1415100050

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SYAHNA ZATIRA
NPM : 1415100050
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN,
EVALUASI ANGGARAN DAN SISTEM
PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS
PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN

MEDAN, AGUSTUS 2019

KETUA PROGRAM STUDI


(Anggi Pratama Nasution, SE.,M.Si)




(Dr. Surya Nita, S.H.,M.Hum)

PEMBIMBING I


(Fitri Yani Panggabean, SE.,M.Si)

PEMBIMBING II


(Oktarini Khamilah Siregar, S.E.,M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SYAHNA ZATIRA
NPM : 1415100050
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS / AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN,
EVALUASI ANGGARAN, DAN SISTEM
PELAPORAN TERHADAP
AKUNTABILITAS PADA PEMERINTAH
KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi saya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Juni 2019


SYAHNA ZATIRA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAHNA ZATIRA
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/23 Juni 1995
NPM : 1415100050
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jl. Sei Mencirim Komplek Lalang Greenland II
Blok F No.1-A

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Sehubungan dengan hal ini, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini, saya perbuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Juni 2019

Penulis



Syahna Zaira
Syahna Zaira

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran, evaluasi anggaran, dan sistem pelaporan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap akuntabilitas Pemerintahan Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode asosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Medan. Sampel dalam penelitian ini adalah 42 responden dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan data yang digunakan adalah data primer yaitu kuisioner. Metode analisis data yang digunakan adalah model regresi linier berganda, asumsi klasik, uji F, uji t dan uji determinasi dengan menggunakan *software SPSS*. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pada SKPD Kota Medan. Evaluasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pada SKPD Kota Medan. Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pada SKPD Kota Medan. Partisipasi anggaran, evaluasi anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pada SKPD Kota Medan.

Kata Kunci : Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas

ABSTRACT

The research aims to determine the effect of budget participation, budget evaluation, and reporting systems have a partial and simultaneous effect on the accountability of Medan City Government. This study uses causal associative methods. The population in this study were all regional work units in the city of Medan. The sample in this study was 42 respondents using purposive sampling techniques and the data used were primary data, namely questionnaires. Data analysis methods used are multiple linear regression models, classic assumptions, F tests, t tests and determination tests using SPSS software. The results of this study indicate that the budgetary participation has a positive and significant effect on accountability in Medan City SKPD. The budget evaluation has a positive and significant effect on accountability in the Medan City SKPD. The reporting system has a positive and significant effect on accountability in the Medan City SKPD. Budget participation, budget evaluation and reporting systems have a positive and significant effect on accountability in the Medan City SKPD.

Keywords : Budget Participation, Budget Evaluation, Reporting and Accountability Systems

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	10
1. Akuntabilitas	10
2. Partisipasi Anggaran.....	16
3. Evaluasi Anggaran	23
4. Sistem pelaporan	27
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Konseptual	33
D. Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
C. Populasi dan Sampel	38
D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	40
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	47
1. Deskripsi Karakteristik Responden.....	47
2. Deskripsi Variabel Penelitian	49

3. Pengujian Validitas dan Reliabilitas	62
4. Pengujian Asumsi Klasik.....	66
5. Regresi Linier Berganda.....	71
6. Uji Kesesuaian (<i>Test Goodness Of Fit</i>).....	72
B. Pembahasan	74
1. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas	74
2. Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas.	75
3. Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas ...	76
4. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas	76
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	77
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	
 BIODATA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Anggaran Belanja Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemko Medan Provinsi Sumatera Utara (2014 – 2015).....	3
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya	31
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	38
Tabel 3.2 Daftar Sampel di OPD Kota Medan	39
Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel.....	40
Tabel 3.4 Skala Pengukuran Likert	43
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	47
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	48
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	48
Tabel 4.5 Pernyataan X _{1.1}	49
Tabel 4.6 Pernyataan X _{1.2}	50
Tabel 4.7 Pernyataan X _{1.3}	51
Tabel 4.8 Pernyataan X _{1.4}	51
Tabel 4.9 Pernyataan X _{1.5}	52
Tabel 4.10 Pernyataan X _{2.1}	52
Tabel 4.11 Pernyataan X _{2.2}	53
Tabel 4.12 Pernyataan X _{2.3}	54
Tabel 4.13 Pernyataan X _{2.4}	54
Tabel 4.14 Pernyataan X _{2.5}	55
Tabel 4.15 Pernyataan X _{3.1}	56
Tabel 4.16 Pernyataan X _{3.2}	56
Tabel 4.17 Pernyataan X _{3.3}	57
Tabel 4.18 Pernyataan X _{3.4}	58
Tabel 4.19 Pernyataan X _{3.5}	58
Tabel 4.20 Pernyataan Y.1.....	59
Tabel 4.21 Pernyataan Y.2.....	60
Tabel 4.22 Pernyataan Y.3.....	60

Tabel 4.23	Pernyataan Y.4.....	61
Tabel 4.24	Pernyataan Y.5.....	61
Tabel 4.25	Uji Validitas X ₁ (Partisipasi Anggaran).....	62
Tabel 4.26	Uji Validitas X ₂ (Evaluasi Anggaran).....	63
Tabel 4.27	Uji Validitas X ₃ (Sistem Pelaporan)	63
Tabel 4.28	Uji Validitas Y (Akuntabilitas)	63
Tabel 4.29	Uji Reliabilitas X ₁ (Partisipasi Anggaran)	65
Tabel 4.30	Uji Reliabilitas X ₂ (Evaluasi Anggaran)	65
Tabel 4.31	Uji Reliabilitas X ₃ (Sistem Pelaporan)	65
Tabel 4.32	Uji Reliabilitas Y (Akuntabilitas).....	66
Tabel 4.33	Uji Normalitas <i>One Sample Kolmogorov Smirnov Test</i>	68
Tabel 4.34	Uji Multikolinearitas	69
Tabel 4.35	Regresi Linier Berganda	71
Tabel 4.36	Uji Simultan.....	72
Tabel 4.37	Uji Parsial	73
Tabel 4.38	Uji Determinasi.....	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	35
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas	66
Gambar 4.2 P-P Plot Uji Normalitas.....	67
Gambar 4.3 <i>Scatterplot</i> Uji Heteroskedastisitas.....	70

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran dan Sistem pelaporan Terhadap Akuntabilitas Pada Pemerintah Kota Medan”, yang diajukan sebagai bahan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih atas segala dukungan, pemikiran, tenaga, materi dan juga doa dari semua pihak yang telah membantu peneliti selama menjalani masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution, S.E.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Fitri Yani Panggabean, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Oktarini Khamilah Srg, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.

6. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masih dalam proses perkuliahan sebagai bekal dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Yang tercinta kedua orang tua penulis yakni Ayahanda Mukhlis dan Ibunda T. Chairani yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis.
8. Kepada keluarga penulis yakni Ikhsan (Abang), Bilqis (adek) yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis.
9. Kepada teman-temanku Sugra, Ayu, Dita dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
10. Kepada teman-teman terdekatku di kampus yaitu Anisa Apriani, Andriani Safitri, Fitri Rahmadani, Friska Marpaung, Nurbaidah Hanum dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Terimakasih.

Medan, Agustus 2019
Penulis

Syahna Zatira
1415100050

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Hidup ini penuh dengan perjuangan, walaupun terkadang semua tak semulus yang diharapkan. Tetapi yakinlah Allah punya jalan yang lebih baik.
- Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (QS.Al-Insyirah: 5)

Kupersembahkan kepada :

- Allah SWT pemberi ketajaman hati dan fikiran bagi penulis.
- Mama dan Papa yang penulis sayangi dan cintai, atas segala do'a dan dukungannya.
- Abang dan adikku tersayang yang selalu mendukung dalam hal apapun.
- Keluarga besarku dimanapun kalian berada.
- Teman-teman Angkatan 2014
- Almamaterku

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik administrasi publik. Ini karena publik menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan kebijakan, program, proyek, dan aktivitas rutin yang dikerjakan oleh organisasi sektor publik. Bentuk perhatian ini merupakan konsekuensi yang wajar dari pajak dan retribusi yang telah dibayarkan masyarakat. Di negara demokrasi seperti Indonesia, organisasi publik dituntut untuk akuntabel terhadap seluruh tindakan-tindakan yang telah dilakukannya.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai keuangan daerah. Selain perubahan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah, kedua Undang-Undang tersebut merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain partisipasi anggaran, evaluasi anggaran, dan sistem pelaporan. Penerapan anggaran berbasis akuntabilitas diatur dalam

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis akuntabilitas dan transparansi. Dimana anggaran berbasis akuntabilitas menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif.

Pada Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintah Kota Medan dimulai dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan dituangkan dalam nota kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) antara Kepala daerah dan DPRD, setelah itu dilakukannya penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), setelah adanya surat edaran ini setiap SKPD membuat Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) atas program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun yang bersangkutan. Kemudian dilakukannya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan penyampaiannya, setelah itu dilakukannya evaluasi APBD, ketika dalam proses evaluasi ini APBD yang diajukan diterima, langkah selanjutnya adalah penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Berdasarkan berita yang dikutip dari harian Analisa Kota Medan menyatakan bahwa Secara umum kontribusi realisasi pajak daerah terhadap PAD maupun pendapatan daerah dalam tahun 2017 secara persentase masih dibawah 100% dalam 4 (empat) tahun terakhir seperti pada tahun 2013 pencapaian LAKIP sebesar 79,98, pada tahun 2014 sebesar 88,63, pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 82,86%, pada tahun 2016 sebesar 78%.

Untuk Pemerintah Kota Medan, berdasarkan data APBD Tahun 2014-2015, secara keseluruhan belum menunjukkan indikasi adanya peningkatan akuntabilitas dan perbaikan akuntabilitas yang signifikan dalam pelaksanaannya seperti yang diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Data Anggaran Belanja Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemko Medan
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 – 2015

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2014	4.560.412.529.543,87	4.042.115.828.231,62	88,63
2015	5.046.111.839.162,45	4.181.096.448.524,36	82,86

Sumber : LAKIP Kota Medan (<http://pemukomedan.go.id>), 2018

Berdasarkan tabel 1.1 di atas bahwa realisasi belanja BPKD pada tahun 2014-2015 tidak mencapai 100% sementara menurut Halim (2012: 20) Analisis terhadap akuntabilitas belanja daerah di nilai baik apabila realisasi mencapai 100%, hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Penilaian akuntabilitas anggaran belanja merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, Standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan.

Berdasarkan tabel 1.1 terjadi penurunan persentase realisasi anggaran belanja dari tahun 2014-2015 yang artinya penggunaan anggaran belanja yang tidak efisien penggunaannya serta tidak maksimalnya peranan anggaran dalam mekanisme pengendalian atas proses operasional. Sesuai teori yang dikemukakan oleh Mulyadi (2011:43) bahwa Analisis terhadap belanja daerah secara umum terlihat dari realisasi biaya dan anggarannya. Apabila realisasi anggaran belanja daerah yang tidak melampaui anggaran (target) maka akuntabilitas dapat dinilai dengan baik”.

Bedasarkan beberapa faktor diantaranya adalah:

1. Pejabat Pemerintah Kota Medan sering terjadi keterlambatan laporan penyusunan anggaran dalam penyampaian ke DPRD Kota Medan.
2. Masih lemahnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014 dan 2015 sehingga dinilai lambat.
3. Kurangnya partisipasi penyusunan anggaran.

Dari hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014 dan 2015 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurut Rivai (2009:45) Akuntabilitas oleh pemerintah daerah sangat penting karena merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai entitas yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan daerah. Dalam konteks demokrasi, masyarakat sebagai pihak yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah berhak memperoleh informasi atas kinerja pemerintah.

Dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah dikeluarkan regulasi yang mengatur mengenai perubahan pengelolaan keuangan

daerah untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 (Inpres 7/1999) tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dipandang perlu untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas ini merupakan bentuk pelaporan akuntabilitas yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang diamanahkan untuk melaksanakan program / kegiatan dalam rangka untuk mencapai visi dan misi dan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan anggaran berbasis akuntabilitas terhadap Akuntabilitas instansi pemerintah. Hevyana (2015), telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah yang mana berdasarkan hasil analisisnya disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Nurhalimah (2013), menguji tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas aparatur perangkat daerah di Pemerintah Aceh, hasil ini menunjukkan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas aparatur perangkat daerah, sedangkan sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas aparatur perangkat daerah di Pemerintah Aceh.

Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah melihat dari fenomena yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah, dimana akuntabilitas pemerintah saat ini banyak disoroti oleh masyarakat, terutama akuntabilitas instansi pemerintah yang

sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik. Berdasarkan uraian singkat diatas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Pada Pemerintah Kota Medan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas maka hal-hal yang menjadi identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

- a. Dalam catatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD pada tahun 2014-2015 tidak mencapai 100%.
- b. Masih lemahnya pertanggung jawaban pelaksanaan APBD di Kota Medan.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas maka peneliti membatasi penelitian mengenai partisipasi anggaran, evaluasi anggaran, sistem pelaporan, akuntabilitas di Pemerintahan Kota Medan.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pada Pemerintahan Kota Medan?

2. Apakah evaluasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pada Pemerintahan Kota Medan?
3. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas pada Pemerintahan Kota Medan?
4. Apakah partisipasi anggaran, evaluasi anggaran, dan sistem pelaporan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas Pemerintahan Kota Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap akuntabilitas.
- b. Untuk mengetahui pengaruh evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas
- c. Untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas
- d. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran, evaluasi anggaran, dan sistem pelaporan secara simultan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Bagi peneliti
Diharapkan dapat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya mengenai partisipasi anggaran, evaluasi anggaran, dan sistem pelaporan pemerintahan.

b. Bagi institusi

Diharapkan dapat member masukan bagi para penentu kebijakan di instansi pemerintah kota medan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dibutuhkan adanya keterlibatan dari manajemen bawahan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Pelimpahan wewenang yang diberikan pada manajemen bawahan mempunyai hubungan erat dengan partisipasi penyusunan anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran mempunyai hubungan positif terhadap akuntabilitas Pemerintahan Kota Medan hanya pada pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi.

c. Bagi Akademik

Diharapkan dapat menambah wawasan bagi penelitian yang akan datang mengenai partisipasi anggaran, evaluasi anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas Pemerintahan Kota Medan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari Hevyana (2015) yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Kota Medan”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada :

1. Variabel penelitian: Penelitian terdahulu menggunakan 3 (tiga) variabel

bebas yaitu : partisipasi anggaran (X_1), kejelasan sasaran anggaran (X_2) dan evaluasi anggaran (X_3) dan satu variabel terikat yaitu kinerja aparat pemerintah (Y). Sedangkan penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu : partisipasi anggaran (X_1), evaluasi anggaran (X_2) dan sistem pelaporan (X_3) dan satu variabel terikat yaitu akuntabilitas pemerintahan (Y).

2. Jumlah observasi/sampel: peneliti terdahulu berjumlah 75 pegawai sedangkan penelitian ini menggunakan 42 pegawai.
3. Waktu penelitian: peneliti terdahulu dilakukan pada tahun 2015 sedangkan penelitian ini tahun 2019.
4. Lokasi penelitian : Penelitian terdahulu di SKPD Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian ini dilakukan di SKPD Pemerintahan Kota Medan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas sebagai konsep etika yang dekat dengan administrasi publik dan pemerintahan mempunyai arti yang kadang digunakan secara sinonim dengan konsep yang dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat dipertanyakan, yang dapat dipersalahkan, dan yang mempunyai ketidakbebasan, yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik (Djalil, 2014).

Menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan instrumen yang menunjukkan apakah prinsip-prinsip pemerintahan, hukum, keterbukaan, transparansi, keberpihakan dan kesamaan hak dihadapan hukum telah dihargai atau tidak. Akuntabilitas adalah hal yang sangat penting untuk menjamin nilai-

nilai seperti efisien, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas dari administrasi publik. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkret dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Dilihat dari perspektif fungsional, akuntabilitas dipandang sebagai suatu tingkatan dengan tiap tahap berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak ukuran-ukuran subjektif. Tahap-tahap tersebut adalah:

1) *Probity and legality accountability.*

Hal ini menyangkut Pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan perundang-undangan.

2) *Process accountability.*

Hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (*planning, allocating, dan managing*).

3) *Performance accountability.*

Pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (*efficient and economy*).

4) *Program accountability.*

Di sini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (*outcomes and effectiveness*).

5) *Policy accountability.*

Di dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (*value*).

b. Pengukuran Akuntabilitas

Rakhmat (2018: 156) indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa maupun media komunikasi personal,
- 2) Kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program,
- 3) Akses public pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat,
- 4) Ketersediaan sistem informasi manajemen, dan
- 5) Monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Sedangkan Menurut Stephen dan Marry yang dialihbahasakan oleh Hermaya dan Harry (2012:8) agar fungsi-fungsi manajemen berjalan sesuai harapan ada empat indikator akuntabilitas yang perlu dikarakteristik yaitu :

- 1) Kemampuan Perencanaan
Yaitu kemampuan manajemen yang mencakup proses menentukan tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, bagaimana cara mengelompokkan tugas-tugas itu, siapa yang harus melapor ke siapa, dan dimana keputusan harus dibuat.
- 2) Kemampuan pengorganisasian
Yaitu kemampuan manajemen yang mencakup proses memotivasi mnbawahan, mempengaruhi individu atau tim sewaktu mereka bekerja, memiliki saluran komunikasi yang paling efektif, dan memecahkan dengan berbagai cara masalah perilaku pegawai.
- 3) Kemampuan kepemimpinan
Yaitu kemampuan manajemen yang mencakup proses pemantauan akuntabilitas aktual, membandingkan actual dengan standar, dan membuat koreksinyajika perlu.

4) Kemampuan pengendalian

Yaitu kemampuan manajemen yang mencakup proses mendefinisikan sasaran, menetapkan strategi untuk mencapai sasaran dan menyusun rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sejumlah kegiatan.

c. Tujuan Akuntabilitas

Tujuan akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap. Kepercayaan publik yang tinggi akan dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen pemerintahan akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat.

Slamet (2015:6) menyatakan Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas pemerintahan sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Penyelenggara pemerintahan harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik. Selain itu tujuan akuntabilitas adalah menilai akuntabilitas pemerintahan dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik.

Berkaitan dengan tujuan akuntabilitas yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintahan bahwa guna mengukur akuntabilitas mereka secara objektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil karakteristik harus dimasyarakatkan dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi. Pemerintahan dikatakan memiliki akuntabilitas tinggi jika proses dan hasil akuntabilitas pemerintahan dianggap benar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Slamet (2015:6) ada delapan hal yang harus dikerjakan pemerintahan untuk peningkatan akuntabilitas:

- 1) Pemerintahan harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban.
- 2) Pemerintahan perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.
- 3) Pemerintahan menyusun rencana pengembangan pemerintahan dan menyampaikan kepada publik/stakeholders diawal setiap tahun anggaran.
- 4) Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran akuntabilitaspemerintahan dan disampaikan kepada stakeholders.
- 5) Melakukan pengukuran pencapaian akuntabilitas pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/stakeholders dia akhir tahun.
- 6) Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik.
- 7) Menyediakan informasi kegiatan pemerintahan kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan.
- 8) Memperbaharui rencana kerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas

Banyak faktor yang mempengaruhi akuntabilitas organisasi baik publik maupun swasta. Faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian akuntabilitas organisasi sebagai berikut :

- 1) Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi, semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi akuntabilitas organisasi tersebut.
- 2) Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi.
- 3) Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan.
- 4) Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan seperti dalam proses penyusunan anggaran dan penggunaan dana alokasi anggaran.
- 5) Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standard dan tujuan organisasi.
- 6) Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lain-lainnya.

Menurut Atmosoeparto (2012: 181) mengemukakan bahwa akuntabilitas organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, secara lebih lanjut kedua faktor tersebut diuraikan sebagai berikut :

- 1) Faktor eksternal, yang terdiri dari
 - (a) Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal.
 - (b) Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu system ekonomi yang lebih besar.
 - (c) Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di masyarakat, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan akuntabilitas organisasi.
- 2) Faktor internal, yang terdiri dari :
 - (a) Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi
 - (b) Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada
 - (c) Sumber Daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak jalanya organisasi secara keseluruhan.
 - (d) Budaya Organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi

dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan.

Menurut Harry (2010 :8) agar fungsi-fungsi manajemen berjalan sesuai harapan ada empat indikator akuntabilitas yang perlu dikarakteristik yaitu :

- 1) Kejujuran
Yaitu berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku dan dalam penggunaan dana harus dilakukan secara benar.
- 2) Proses
Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, manajemen dan proses administrasi.
- 3) Program
Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal
- 4) Kebijakan
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam mempertimbangkan masa depan.

2. Partisipasi Anggaran

a. Pengertian Partisipasi Anggaran

Partisipasi anggaran menggambarkan keterlibatan pegawai dalam menyusun anggaran pada pusat pertanggung jawaban. Organisasi sering mengikut sertakan pegawai tingkat menengah dan bawah dalam proses penyusunan anggaran. Keikutsertaan para pegawai ini sangat penting dalam upaya memotivasi bawahan untuk turut serta mencapai itujuan. Partisipasi memungkinkan terjadinya komunikasi yang semakin baik, interaksi satu sama lain serta bekerjasama dalam tim untuk mencapai tujuan organisasi (Kurnia,2012).

Dengan menyusun anggaran secara partisipasi diharapkan akuntabilitas para pegawai akan meningkat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika

suatu tujuan atau standar yang dirancang secara partisipasi disetujui, maka pegawai akan menginternalisasikan tujuan atau standar yang ditetapkan, dan para *stakeholder* juga memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena mereka ikut serta terlibat dalam penyusunannya. Partisipasi penganggaran adalah tingkat pengaruh dan keterlibatan yang dirasakan individu dalam proses perancangan anggaran. Tingkat pengaruh tersebut menjadi factor utama dalam penelitian Milani tersebut untuk membedakan antara anggaran partisipasi dengan anggaran non partisipasi. Sedangkan Ghozali (2010) membedakan partisipasi menjadi dua yaitu perasaan partisipasi dan partisipasi sesungguhnya. Perasaan partisipasi berarti seberapa luas individu merasa bahwa dia telah mempengaruhi keputusan sedangkan partisipasi sesungguhnya meliputi partisipasi legislatif, yaitu penciptaan system format untuk tujuan pembuatan keputusan khusus dan partisipasi informasi yaitu partisipasi yang terjadi antara kepala pegawai dan bawahannya. Partisipasi secara luas pada dasarnya merupakan proses organisasional, dimana para individu terlibat dan mempunyai pengaruh dalam pembuatan keputusan yang secara langsung berpengaruh terhadap individu tersebut. Jadi dengan semakin tinggi tingkat keterlibatan manager dalam proses penyusunan anggaran, akan semakin meningkatkan akuntabilitas.

b. Manfaat Partisipasi Anggaran

Salah satu manfaat dari partisipasi yang berhasil adalah bahwa partisipan menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya tugas dalam pekerjaan mereka. Partisipan dapat meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua tingkatan manajemen. Partisipasi juga meningkatkan kerjasama antar

anggota kelompok dalam penetapan tujuan. Tujuan organisasi yang dibantu penetapannya oleh orang-orang tersebut kemudian akan dipandang sebagai tujuan yang selaras dengan tujuan pribadi mereka. Proses ini disebut dengan internalisasi tujuan. Kurangnya internalisasi tujuan dapat menimbulkan konflik antara tujuan pribadi individual dan tujuan yang terkait dengan pegawai. Karena tujuan dan kebutuhan pribadi biasanya mendominasi tujuan organisasi, dan ketika terdapat tingkat kesatuan kelompok yang tinggi, maka persyaratan untuk efisiensi yang maksimal dalam pencapaian tujuan akan tercapai.

Menurut Abdul (2012:29), partisipasi juga dapat menurunkan ketidakadilan yang dipandang ada dalam alokasi sumber daya organisasi antara sub-unit organisasi, serta reaksi negatif yang dihasilkan dari persepsi semacam itu. Adanya proses negosiasi dan banyaknya diskusi anggaran yang terjadi dalam rapat, manajer akan menyadari masalah dari rekan-rekannya di unit organisasi lainnya dan memiliki pemahaman yang lebih baik atas saling ketergantungan antar departemen. Dengan demikian, banyak masalah potensial yang berkaitan dengan anggaran dapat dihindari.

Selain itu, Darlis (2012: 35) juga mengungkapkan bahwa partisipasi memberikan dampak positif terhadap perilaku pegawai, meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dan meningkatkan kerjasama di antara para manajer. Betapapun demikian, bentuk keterlibatan bawahan/pelaksana anggaran di sini dapat bervariasi, tidak sama satu organisasi dengan organisasi yang lain. Tidak ada pandangan yang seragam mengenai siapa saja yang harus turut berpartisipasi, seberapa dalam mereka terlibat dalam pengambilan keputusan. Organisasi harus memutuskan sendiri batasan-batasan mengenai partisipasi yang akan mereka

terapkan. Penerapan partisipasi dan penyusunan anggaran memberikan banyak manfaat antara lain:

1. Partisipasi (orang yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran) menjadi *ego-involved* tidak hanya *task-involved* dalam kerja mereka.
2. Partisipasi akan menaikkan rasa kebersamaan dalam kelompok, yang akibatnya akan menaikkan kerjasama anggota kelompok dalam penerapan sasaran.
3. Partisipasi dapat mengurangi rasa tertekan akibat adanya anggaran
4. Partisipasi dapat mengurangi rasa ketidaksamaan di dalam alokasi sumber daya di antara bagian-bagian organisasi.

Meskipun partisipasi mempunyai banyak manfaat, bukan berarti partisipasi tidak memiliki keterbatasan dan masalah yang berkaitan dengan partisipasi. Dan sebagaimana jika partisipasi tidak diterapkan secara benar, partisipasi dapat merusak motivasi dan menurunkan kemampuan untuk mencapai sasaran organisasi.

Yayasan Asia (*the Asia Foundation*) dari *Asian Development Bank* (2008) dalam bukunya *Panduan Analisis dan Advokasi Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia* mengatakan, proses anggaran pemerintah daerah berlangsung selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dengan urutan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan dan Penetapan Anggaran (1 tahun sebelum tahun anggaran berkenaan),
Tahap penyusunan anggaran terdiri atas tahap pengumpulan aspirasi masyarakat melalui forum Musrenbang, proses penyusunan kegiatan oleh satuan kerja diserahkan oleh kepala daerah (pihak eksekutif) kepada DPRD (pihak legislatif) untuk dibahas dan disetujui bersama. Proses penyusunan anggaran yang memerlukan waktu beberapa bulan, Tim Anggaran Eksekutif yang beranggotakan unsur-unsur dari Sekretariat Daerah, Bappeda, dan Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting. Walaupun masyarakat dimintai pendapatnya dalam proses penentuan prioritas program namun pada akhirnya proses

penyusunan anggaran dilakukan secara tertutup di masing-masing SKPD. Penetapan anggaran merupakan tahapan yang dimulai ketika pihak eksekutif menyerahkan usulan anggaran kepada pihak legislatif. Pada umumnya proses ini ditandai dengan pidato kepala daerah (Bupati/Walikota) di hadapan anggota DPRD. Selanjutnya DPRD akan melakukan pembahasan untuk beberapa waktu. Selama masa pembahasan akan terjadi diskusi antara pihak Panitia Anggaran Legislatif dengan Tim Anggaran Eksekutif dimana pada kesempatan ini pihak legislatif berkesempatan untuk menanyakan dasar-dasar kebijakan eksekutif dalam membahas usulan anggaran tersebut.

- 2) Pelaksanaan Anggaran (1 tahun saat tahun anggaran berjalan).
Pelaksanaan anggaran adalah tahapan yang dimulai sejak APBD disahkan melalui peraturan daerah pada setiap akhir tahun sebelum tahun anggaran baru dimulai. Tahapan pelaksanaan berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai awal tahun anggaran baru pada bulan Januari setiap tahunnya. Tahapan pelaksanaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak eksekutif melalui SKPD.
- 3) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (setengah tahun).
Tahapan ini mencakup antara penyiapan Laporan Semester pertama dan Laporan tahunan termasuk penelaahan atas pelaksanaan anggaran untuk waktu satu tahun anggaran yang bersangkutan. Tahapan pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dan BPKP (untuk pembelanjaan yang menggunakan APBN) serta pemeriksaan eksternal oleh BPK.

c. Indikator Partisipasi Anggaran

Darlis (2012:35) juga mengungkapkan bahwa partisipasi memberikan dampak positif terhadap perilaku pegawai, meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dan meningkatkan kerjasama di antara para pegawai. Betapapun demikian, bentuk keterlibatan bawahan/pelaksana anggaran di sini dapat bervariasi, tidak sama satu organisasi dengan organisasi yang lain. Tidak ada pandangan yang seragam mengenai siapa saja yang harus turut berpartisipasi, seberapa dalam mereka terlibat dalam pengambilan keputusan (Siegel dan Marconi, 2009). Organisasi harus memutuskan sendiri batasan-batasan mengenai partisipasi yang akan mereka terapkan.

Penerapan partisipasi dan penyusunan anggaran memberikan banyak manfaat antara lain:

1. Partisipan (orang yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran) menjadi *ego-involved* tidak hanya *task-involved* dalam kerja mereka.
2. Partisipasi akan menaikkan rasa kebersamaan dalam kelompok, yang akibatnya akan menaikkan kerjasama anggota kelompok dalam penerapan sasaran.
3. Partisipasi dapat mengurangi rasa tertekan akibat adanya anggaran
4. Partisipasi dapat mengurangi rasa ketidaksamaan di dalam alokasi sumber daya di antara bagian-bagian organisasi.

Meskipun partisipasi mempunyai banyak manfaat, bukan berarti partisipasi tidak memiliki keterbatasan dan masalah yang berkaitan dengan partisipasi. Jika partisipasi tidak diterapkan secara benar, partisipasi dapat merusak motivasi dan menurunkan kemampuan untuk mencapai sasaran organisasi. Menurut Darlis (2012:38), alasan lain mengapa partisipasi mungkin tidak berhasil adalah tidak ada usaha serius yang dibuat untuk menjamin partisipasi dan kerjasama dari para pegawai tingkat bawah dan pemimpin. Agar partisipasi menjadi efektif, partisipasi harus memiliki input riil terhadap keputusan dan pandangan mereka harus memiliki bobot tertentu dalam hasil akhir. Jika, saran-saran anggaran dari orang-orang ditolak oleh tingkat yang lebih tinggi tanpa penjelasan sama sekali, atau dengan pernyataan yang fasih bahwa saran tersebut tidak sesuai dengan tujuan manajemen puncak, maka partisipasi akan dipandang sebagai suatu kepura-puraan. Orang akan menjadi kecewa. Jika hal ini terjadi, sikap negatif atau bermusuhan terhadap manajemen akan berkembang, dan hal

tersebut mungkin memberikan sinyal terhadap penurunan yang akan terjadi dalam efisiensi dan output.

Partisipasi dapat diterapkan secara efektif, jika manajemen puncak serta para pegawai tingkat bawah bekerjasama dalam memahami dan menerapkan partisipasi dalam organisasi mereka, jika hal tersebut telah dilakukan partisipasi akan berhasil diterapkan dalam kondisi apapun, dan sebaliknya apabila manajemen puncak serta pegawai tingkat bawah tidak bersungguh-sungguh dalam menerapkan partisipasi bahkan dalam organisasi yang paling demokratis dan desentralisasi sekalipun, partisipasi tidak akan sukses untuk diterapkan.

Sesuai dengan teori yang didapat mengenai partisipasi anggaran, maka dapat ditentukan indikator partisipasi anggaran (Brownell dalam Falikhatun :2009), yaitu:

- 1) Keterlibatan
Keuangan organisasi dalam anggaran pendapatan dan belanja juga merupakan pembiayaan setiap program dan kegiatan organisasi.
- 2) Pengaruh
Partisipasi anggaran adalah proses yang menggambarkan individu-individu terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut
- 3) Komitmen
Karena identifikasi dan ego-keterlibatan dengan tujuan anggaran, partisipasi berkaitan dengan akuntabilitas dan begitu mengarah pada peningkatan motivasi dan komitmen terhadap budget.

3. Evaluasi Anggaran

a. Pengertian Evaluasi Anggaran

Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan terhadap anggaran yang telah disusun dan mengetahui seberapa besar penyimpangan yang telah terjadi dapat ditelusuri sampai kepada para pelaksana anggaran yang bertanggung

jawab. Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian akuntabilitas departemen. Dengan dilakukannya evaluasi terhadap akuntabilitas pemerintah kota maka akan diketahui seberapa besar tingkat partisipasi dalam penyusunan anggaran pemerintah kota.

Pentingnya aspek evaluasi anggaran diterapkan dalam rangka untuk melakukan prospektif yang berkaitan dengan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari penggunaan anggaran yang dikelola oleh aparat pemerintah. Hasil evaluasi juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang perimbangan anggaran, alokasi anggaran dan berbagai pengawasan subsidi anggaran yang diperuntukkan kepada pemerintah. Kegiatan pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat terkelola dengan baik perlu ada suatu program nyata yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah khususnya yang berkaitan dengan SKPD untuk dapat diperbaiki dengan menggunakan indikator pengukuran evaluasi yang tepat dan akurat dalam menilai suatu kegiatan penganggaran yang mempengaruhi kinerja aparat.

Evaluasi anggaran menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan departemen dan digunakan dalam evaluasi akuntabilitas mereka. Munawar (2006) menemukan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh terhadap perilaku aparat pemerintah daerah Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyiapkan anggaran mereka selalu melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan, namun pada saat pelaksanaan mereka tidak melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan sehingga membuat akuntabilitas mereka menjadi rendah.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan evaluasi anggaran adalah evaluasi anggaran merupakan tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya dan digunakan sebagai dasar penilaian akuntabilitas.

b. Tujuan Evaluasi Anggaran

Evaluasi secara mendasar mempunyai 4 tujuan yaitu: 1) meyakinkan bahwa akuntabilitas yang sesungguhnya sesuai dengan akuntabilitas yang diharapkan, 2) memudahkan untuk membandingkan antara akuntabilitas individu satu dengan yang lainnya, 3) system evaluasi akuntabilitas dapat memicu suatu isyarat tanda bahaya, member sinyal mengenai masalah-masalah yang mungkin terjadi dan 4) untuk menilai pembuatan keputusan manajemen Kurnia (2012).

Menurut Wahab (2012: 51) tujuan dari evaluasi anggaran adalah sebagai berikut :

- a. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai akuntabilitas kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuantujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai
- b. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai - nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefenisikan dan mengoperasikan tujuan dan target
- c. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Informasi tentang tidak memadai akuntabilitas kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan

c. Fungsi Evaluasi Anggaran

Menurut Supriyono (2010:41) evaluasi anggaran mempunyai beberapa macam fungsi antara lain untuk :

1) Fungsi Koordinasi

Evaluasi anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada didalam organisasi agar dapat bekerja secara selaras kearah pencapaian tujuan. Perlu diketahui bahwa koordinasi harus diusahakan, jadi tidak dapat diharapkan berjalan secara otomatis karena setiap individu didalam organisasi mempunyai kepentingan dan persepsi yang berbeda terhadap tujuan organisasi. Proses untuk menyelaraskan hubungan antara pegawai dan pekerja mereka agar saling berhubungan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan membagi pekerjaan diantara kelompok, individu, dan mengkoordinasikan hubungan antara kegiatan individu dan kelompok.

2) Fungsi Komunikasi

Jika organisasi diinginkan berfungsi secara efisien, maka organisasi tersebut harus menentukan saluran komunikasi melalui dan berbagai unit dalam organisasi tersebut. Komunikasi meliputi penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, rencana, pelaksanaan, dan penyimpangan yang timbul. Dalam penyusunan,

berbagai unit dan tingkatan organisasi berkomunikasi dan berperan serta dalam proses anggaran. Selanjutnya, setiap orang yang bertanggungjawab terhadap anggaran harus dinilai mengenai prestasinya melalui laporan pengendalian produk.

3) Fungsi Motivasi

Anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana didalam melaksanakan tugas-tugas atau mencapai tujuan. Memotivasi para pelaksana dapat didorong dengan pemberian insentif dalam bentuk hadiah berupa uang, penghargaan, dan sebagainya kepada mereka yang mencapai prestasi.

4) Fungsi Pengendalian

Evaluasi anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan karena anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari para pelaksana yang ikut berperan serta di dalam penyusunan anggaran tersebut. Pengendalian pada dasarnya adalah membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang timbul apakah sudah menjadi "tanda bahaya" bagi organisasi atau unit-unitnya. Penyimpangan tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi atau penilaian prestasi dan umpan balik untuk perbaikan masa yang akan datang. Seringkali istilah perencanaan dan pengendalian disatukan dan seringkali kedua istilah tersebut digunakan untuk maksud yang sama, sistem anggaran yang baik harus dihubungkan dengan perencanaan dan pengendalian, perencanaan yang baik tanpa pengendalian yang efektif berakibat pemborosan dana dan waktu. Sebaliknya, tanpa perencanaan tidak dapat dilakukan pengendalian ke arah tujuan yang ingin dicapai.

5) Fungsi Pendidikan

Evaluasi anggaran juga berfungsi sebagai alat untuk mendidik para manajer mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya dan sekaligus menghubungkan dengan pusat pertanggungjawaban lain di dalam organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian, anggaran bermanfaat untuk latihan kepemimpinan bagi para manajer atau calon manajer agar dimasa depan mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi.

Menurut Supriyono (2010:41) Indikator dari evaluasi anggaran yaitu:

- a. Efisiensi, b. Penyimpangan anggaran, c. Tanggungjawab, d. Pencapaian sasaran anggaran, e. Evaluasi dari anggaran yang baik akan terwujudnya dari sasaran anggaran yang disusun.

4. Sistem Pelaporan

a. Pengertian Sistem Pelaporan

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengelolaan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Mardiasmo (2009). “Lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus/defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran financial dan non financial”. Menurut Kennis (2011) “Sistem pelaporan yaitu menggambarkan tujuan anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik, serta dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya”.

Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari laporan realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal. Jika sistem informasi yang dimiliki pemerintah daerah masih lemah, maka kualitas informasi yang dihasilkan sistem tersebut dapat menyesatkan bagi yang berkepentingan terutama dalam hal pengambilan keputusan. Informasi yang tepat waktu (*timelines*) menunjukkan pada interval waktu antara kebutuhan informasi dengan tersedianya informasi yang diinginkan oleh pengguna yang berbeda dan frekuensi pelaporan informasi. Sistem pelaporan dalam penelitian ini dikonseptualkan menjadi tiga dimensi yaitu: kecepatan membuat laporan, laporan yang berbeda pada pengguna yang berbeda, frekuensi laporan.

Tujuan dan sasaran APBD harus disesuaikan dengan lima kriteria sebagai berikut: Spesifik, Terukur, Menantang tapi realisti, Berorientasi pada hasil akhir, Memiliki batas waktu. Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan / kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

b. Tujuan Sistem pelaporan

Menurut Wahab (2012: 51) tujuan dari sistem pelaporan adalah sebagai berikut :

- 1) Memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai akuntabilitas kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini karakteristik mengungkapkan seberapa jauh tujuantujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai
- 2) Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai - nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefenisikan dan mengoperasikan tujuan dan target
- 3) Memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai akuntabilitas kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

c. Fungsi Sistem pelaporan

Menurut Supriyono (2010:41) sistem pelaporan mempunyai beberapa macam fungsi antara lain untuk :

- 1) Fungsi Koordinasi
Sistem pelaporan berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada didalam organisasi agar dapat bekerja secara selaras kearah pencapaian tujuan. Perlu diketahui bahwa koordinasi harus diusahakan, jadi tidak dapat diharapkan berjalan secara otomatis karena setiap individu didalam organisasi mempunyai kepentingan dan persepsi yang berbeda terhadap tujuan organisasi. Proses untuk menyelaraskan hubungan antara pegawai dan pekerja mereka agar saling berhubungan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan membagi pekerjaan diantara kelompok, individu, dan mengkoordinasikan hubungan antara kegiatan individu dan kelompok.
- 2) Fungsi Komunikasi
Jika organisasi diinginkan berfungsi secara efisien, maka organisasi tersebut harus menentukan saluran komunikasi melalui dan berbagai unit dalam organisasi tersebut. Komunikasi meliputi penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, rencana, pelaksanaan, dan penyimpangan yang timbul. Dalam penyusunan, berbagai unit dan tingkatan organisasi berkomunikasi dan berperan serta dalam proses anggaran. Selanjutnya, setiap orang yang bertanggungjawab terhadap anggaran harus dinilai mengenai prestasinya melalui laporan pengendalian produk.

3) Fungsi Motivasi

Anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana didalam melaksanakan tugas-tugas atau mencapai tujuan. Memotivasi para pelaksana dapat didorong dengan pemberian insentif dalam bentuk hadiah berupa uang, penghargaan, dan sebagainya kepada mereka yang mencapai prestasi.

4) Fungsi Pengendalian

Sistem pelaporan dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan karena anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari para pelaksana yang ikut berperan serta di dalam penyusunan anggaran tersebut. Pengendalian pada dasarnya adalah membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang timbul apakah sudah menjadi "tanda bahaya" bagi organisasi atau unit-unitnya. Penyimpangan tersebut digunakan sebagai dasar karakteristik atau penilaian prestasi dan umpan balik untuk perbaikan masa yang akan datang. Seringkali istilah perencanaan dan pengendalian disatukan dan seringkali kedua istilah tersebut digunakan untuk maksud yang sama, sistem anggaran yang baik harus dihubungkan dengan perencanaan dan pengendalian, perencanaan yang baik tanpa pengendalian yang efektif berakibat pemborosan dana dan waktu. Sebaliknya, tanpa perencanaan tidak dapat dilakukan pengendalian ke arah tujuan yang ingin dicapai.

5) Fungsi Pendidikan

Sistem pelaporan juga berfungsi sebagai alat untuk mendidik para manajer mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya dan sekaligus menghubungkan dengan pusat pertanggungjawaban lain di dalam organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian, anggaran bermanfaat untuk latihan kepemimpinan bagi para manajer atau calon manajer agar dimasa depan mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi.

d. Indikator Sistem pelaporan

Menurut Nazaruddin (2009) untuk mengukur sistem pelaporan adalah menggunakan beberapa indikator sebagai berikut :

1) Jelas

Sasaran yang ingin dicapai harus jelas dan digambarkan secara terperinci sehingga semua pihak dapat memahami.

2) Spesifik

Sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sasaran tersebut harus memberikan kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya

- 3) Dapat dipahami
Sasaran yang dibuat secara jelas dan spesifik harus dapat dipahami oleh semua pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam pencapaiannya
- 4) *Timeliness*
Menyatakan ketepatan waktu dalam memperoleh informasi mengenai suatu kejadian.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel	Variabel	Model Analisis	Kesimpulan
1	Hevya Na (2015)	Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran, Evaluasi Anggaran, terhadap Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah	X ₁ : Partisipasi anggaran X ₂ : Kejelasan Anggaran X ₃ : Evaluasi Anggaran	Y: Kinerja Aparat Pemerintah Daerah	Regresi Linier Berganda	Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja, Kejelasan Sasaran berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja, Evaluasi Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja.
2	Meria (2015)	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Sistem pelaporan Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Akuntabilitas Pada	X ₁ : Partisipasi Anggarran X ₂ : Sistem pelaporan X ₃ : Struktur Desentralisasi	Y: Akuntabilitas	Regresi Linier Berganda	partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, Sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, Struktur

		Skpd Kota Tanjung Pinang				desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas.
3	Mayura (2014)	Pengaruh Kejelasan Dan Tujuan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Aparat Pemerintah Gorontalo	X ₁ : Kejelasan Anggaran X ₂ : Tujuan Anggaran	Y: Akuntabilitas	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian bahwa kejelasan tujuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sesuai dengan kejelasan atas percepatan pelaksanaan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan APBD, memuaskan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan APBD, besarnya anggaran yang dikelola, keterbatasan sumber daya dan hasil kegiatan yang dicapai.

4	Yuanita (2017)	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kepuasan Kerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial di Pemerintah Kota Medan	X ₁ : Partisipasi Penyusunan Anggaran X ₂ : Kepuasan Kerja X ₃ : Kejelasan Sasaran Anggaran X ₄ : Akuntabilitas Publik	Y: Kinerja Manajerial	Regresi Linier Berganda	Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja, Kepuasan Kerja berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja, Kejelasan Sasaran berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja. Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja.
---	----------------	---	---	-----------------------	-------------------------	---

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan yang mencerminkan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya dari penelitian yang sedang diteliti. Menurut Nurcahyani (2010), Definisi dari partisipasi adalah: Sejauh mana anggaran dipengaruhi oleh keterlibatan para pengurus, alasan-alasan pihak pemimpin daerah pada saat anggaran diproses, keinginan memberikan partisipasi anggaran kepada pihak pemimpin daerah tanpa diminta, sejauhmana kepala daerah mempunyai pengaruh dalam anggaran akhir, Kepentingan pemimpin daerah dalam partisipasinya terhadap anggaran, anggaran didiskusikan antara pihak pemimpin daerah puncak dengan pemimpin pusat pertanggungjawaban pada saat anggaran disusun.

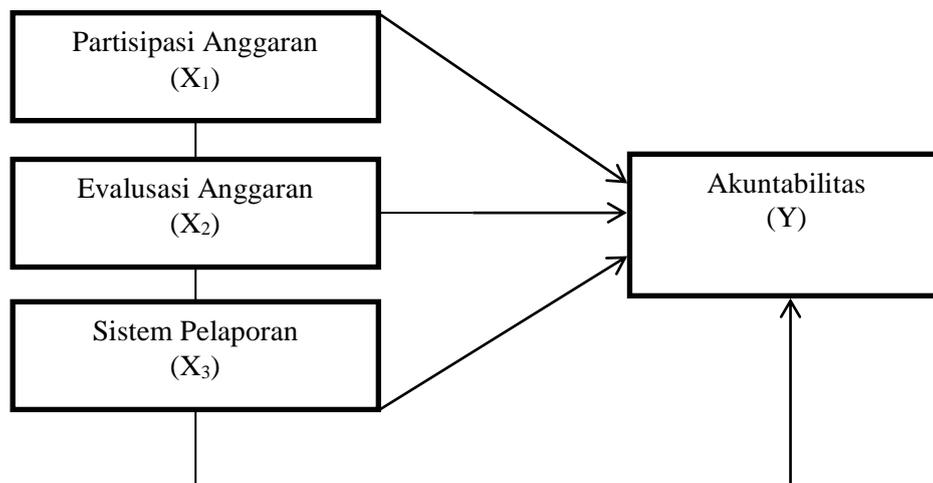
Partisipasi anggaran menggambarkan keterlibatan pemimpin pusat pertanggungjawaban mulai dari tingkat bawah, menengah dan tingkat atas dalam proses penyusunan anggaran. Keterlibatan para pemimpin ini sangat penting dalam upaya memotivasi mereka guna mencapai tujuan pemerintahan. Pentingnya juga aspek evaluasi anggaran diterapkan dalam rangka untuk melakukan prospektif yang berkaitan dengan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari penggunaan anggaran yang dikelola oleh pimpinan. Hasil evaluasi juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang perimbangan anggaran, alokasi anggaran dan berbagai pengawasan subsidi anggaran yang diperuntukkan kepada pimpinan agar dapat meningkatkan akuntabilitas.

Sistem pelaporan merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran tersebut dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas. Sistem pelaporan menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan dan digunakan dalam karakteristik akuntabilitas pemimpin bagian keuangan memberi reaksi yang tidak menguntungkan untuk menggunakan anggaran dalam karakteristik akuntabilitas dalam suatu *gayapunitive* (meningkatkan ketegangan kerja, menurunkan akuntabilitas anggaran). Kecenderungannya, secara jelas hubungan antara variabel lemah.

Pentingnya aspek sistem pelaporan diterapkan dalam rangka untuk melakukan prospektif yang berkaitan dengan hasil karakteristik dan tindak lanjut dari penggunaan anggaran yang dikelola oleh pimpinan. Hasil karakteristik juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang perimbangan anggaran, alokasi

anggaran dan berbagai pengawasan subsidi anggaran yang diperuntukkan kepada pimpinan.

Dari penjelasan diatas maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar2.1
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka konseptual, sesuai dengan tujuan dan masalah yang dikemukakan, maka pengajuan hipotesis sebagai berikut:

1. Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pada SKPD Kota Medan.
2. pEvaluasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pada SKPD Kota Medan.
3. Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas pada SKPD Kota Medan.
4. Partisipasi anggaran, evaluasi anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas pada SKPD Kota Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah asosiatif kausal (hubungan sebab akibat) dimana jika variabel dependen dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen tertentu, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X menyebabkan variabel Y (Erlina, 2011 :66). Menurut Sugiyono (2012:14) bahwa pendekatan asosiatif adalah suatu pendekatan dimana untuk mengkaji bagaimana suatu variabel memiliki keterkaitan atau mengetahui bahwa adanya hubungan atau pengaruh diantara kedua variabel (variable bebas dan variabel terikat).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Medan yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini dimulai dari bulan Februari sampai dengan Juni 2019. Berikut adalah perincian waktu penelitian ini:

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Kegiatan	2018				2019		
		Feb	Mar-Juli	Ags-Nov	Des	Jan-Feb	Mar-Jun	Juli
1	Riset Awal/ Pengajuan Judul	■						
2	Penyusunan Proposal		■	■				
3	Bimbingan Proposal			■				
4	Seminar Proposal				■			
5	Pengumpulan Data					■	■	
6	Pengolahan Data					■	■	
7	Penyusunan Skripsi						■	
8	Bimbingan Skripsi						■	
9	Sidang Meja Hijau							■

Sumber: Penulis, 2019

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah segala sesuatu yang meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek yang diterapkan untuk dipelajari. Menurut Sugiono (2017), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Medan.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari subjek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara *representative* dapat mewakili populasinya. Menurut

Sugiyono (2017: 116) sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (Sugiyono,2017).

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dimana merupakan salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Rincian OPD sebagai sampel dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Daftar Sampel di OPD Kota Medan

No	OPD	Sampel Responden
1	Bagian Pemerintahan	3
2	Bagian Perekonomian	3
3	Bagian Umum	3
4	Dinas Pekerjaan Umum	3
5	Dinas Sosial	3
6	Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah	3
7	Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah	3
8	Dinas Perhubungan	3
9	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	3
10	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Alam	3
11	Badan Peneliti dan Pengembangan	3
12	Kecamatan Medan Kota	3
13	Kecamatan Medan Sunggal	3
14	Kecamatan Medan Petisah	3
Jumlah		42

Sumber : OPD Kota Medan (2019)

Kriteria penelitian yang dilakukan di 14 OPD di Kota Medan yaitu Bagian Keuangan, Bendahara dan Pimpinan.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel Penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti, dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel independent yaitu Partisipasi Anggaran (X_1), Evaluasi Anggaran (X_2), Sistem Pelaporan (X_3), dan 1 (satu) variabel dependen yaitu Akuntabilitas (Y).

2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita, tentang bagaimana mengukur variabel. Definisi operasional dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrument, serta sumber pengukuran berasal dari mana.

Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Partisipasi Anggaran (X_1)	a. Melibatkan Bawahan b. Memberikan Kesempatan Bawahan c. Informasi Kepada Bawahan	Partisipasi anggaran adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh individu dalam penyusunan anggaran. (Sumber: Brownell dalam Falikhatun, 2009)	Likert
Evaluasi Anggaran (X_2)	a. Efisiensi b. Penyimpangan anggaran c. Tanggungjawab d. Pencapaian sasaran anggaran Evaluasi dari anggaran yang baik akan terwujudnya dari sasaran anggaran yang disusun.	Evaluasi anggaran adalah kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilannya dan informasi mengenai sejauh mana suatu	Likert

		kegiatan tertentu telah dicapai sehingga bisa diketahui bila terdapat selisih antara standar yang telah ditetapkan dengan hasil yang bisa dicapai. (Sumber: Supriyono 2010:41)	
Sistem pelaporan (X ₃)	<p>a. Jelas Sasaran yang ingin dicapai harus jelas dan digambarkan secara terperinci sehingga semua pihak dapat memahami.</p> <p>b. Spesifik Sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sasaran tersebut harus memberikan kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya</p> <p>c. Dapat dipahami Sasaran yang dibuat secara jelas dan spesifik harus dapat dipahami oleh semua pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam pencapaiannya</p> <p>d. <i>Timeliness</i> Menyatakan ketepatan waktu dalam memperoleh informasi mengenai suatu kejadian.</p>	Sistem pelaporan adalah tanggung jawab untuk memberikan informasi ke pihak eksternal ditetapkan oleh standar hukum dan professional. (Sumber: Nazaruddin2008)	Likert
Akuntabilitas (Y)	<p>a. Kejujuran Yaitu berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku dan dalam penggunaan dana harus dilakukan secara benar.</p> <p>b. Proses Akuntabilitas proses terkait</p>	Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (<i>agent</i>) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala	Likert

	<p>dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, manajemen dan proses administrasi.</p> <p>c. Program Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal</p> <p>d. Kebijakan Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam mempertimbangkan masa depan.</p>	<p>aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (<i>principal</i>) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.</p> <p>(Sumber: Mardiasmo, 2009)</p>	
--	---	---	--

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui teknik pengambilan angket atau pengumpulan data penelitian. Pengumpulan data menggunakan metode kuisioner yang didistribusikan oleh peneliti kepada responden secara langsung.

Tabel 3.3 Skala Pengukuran Likert

PERTANYAAN	BOBOT
Sangat setuju atau SS	5
Setuju atau S	4
Netral atau N	3
Tidak Setuju atau TS	2
Sangat tidak setuju atau STS	1

Sumber:Sugiyono (2010:107-108)

F.Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pengujian analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan uji simultan (uji-F) dan uji parsial (uji-t) dengan menggunakan *Software Statistica Product and Service Solution (SPSS)*.

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya instrument penelitian yang telah dibuat. Metode yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai korelasi atau r_{hitung} dari variabel penelitian dengan nilai r_{tabel} . Kriteria dalam menentukan validitas suatu kuisisioner adalah:

1. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan valid.
2. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuisisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari

waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas ditujukan untuk mengukur konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu. Tiap butir pertanyaan dalam masing-masing instrument akan diuji dengan menggunakan α . Instrumen dikatakan handal (*reliable*) apabila memiliki $\alpha > 0,60$ (Ghozali, 2011:133).

2. Analisis Statistik Deskriptif

Metode analisis deskriptif merupakan kegiatan menyimpulkan data mentah dalam jumlah yang besar sehingga hasilnya dapat ditafsirkan, dan analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis statistik regresi linier berganda. Persamaan yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + e$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas

a = Konstanta

$b_1; b_2; b_3$ = Koefisien regresi berganda

X_1 = Partisipasi Anggaran

X_2 = Evaluasi Anggaran

X_3 = Sistem Pelaporan

e = Standar Error

Sebelum analisis regresi linier berganda dilakukan terlebih dahulu harus memenuhi kriteria dalam uji asumsi klasik sebagai berikut :

- a. Uji Normalitas, untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variable dependen, independen atau keduanya mempunyai distribusi

normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

- b. Uji Multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi diantara variable independen. Apabila variable independen memiliki angka VIF disekitar 1, dan nilai toleransi mendekati 1 maka dapat dikatakan variable independen tersebut tidak memiliki multikolinearitas dengan variable lain.
- c. Uji Heteroskedastisitas, menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis Penelitian

Untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji statistik t, uji statistik F, dan uji koefisien determinasi.

1. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusannya adalah:

- a) H₃ diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan $sig < \alpha = 5\%$,
- b) H₃ ditolak jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan $> \alpha = 5\%$.

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh suatu variabel

bebas secara parsial (individual) terhadap variasi variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusan adalah:

- a) H1-H4 diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $sig < \alpha = 5\%$
- b) H1-H4 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $sig > \alpha = 5\%$

4. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Penelitian ini menggunakan koefisien determinasi adjusted R^2 , karena penggunaan koefisien adjusted (R^2) mempunyai kelemahan yaitu bisa terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka nilai R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, (Ghozali, 2009:97). Koefisien determinasi digunakan untuk menguji *goodness-fit* dari model regresi. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen, (Ghozali, 2013:177).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang akan diuraikan berikut ini mencerminkan bagaimana keadaan responden yang diteliti meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan masa kerja.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

Tabel 4.1 Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-Laki	22	52.4	52.4	52.4
Perempuan	20	47.6	47.6	100.0
Total	42	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Medan yang menjadi responden adalah berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 22 orang atau sebesar 52.4% dari total responden.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.

Tabel 4.2 Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 20-30 Tahun	3	7.1	7.1	7.1
31-40 Tahun	13	31.0	31.0	38.1
41-50 Tahun	11	26.2	26.2	64.3
51-58 Tahun	15	35.7	35.7	100.0
Total	42	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Medan yang menjadi responden berusia 51-58 tahun, yaitu sebanyak 15 orang atau sebesar 35.7% dari total responden.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.

Tabel 4.3 Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid D3	22	52.4	52.4	52.4
S1	18	42.9	42.9	95.2
S2	2	4.8	4.8	100.0
Total	42	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Medan yang menjadi responden memiliki pendidikan terakhir D3 yaitu sebanyak 22 orang atau sebesar 52.4% dari total responden.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.

Tabel 4.4 Masa Kerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1-5 Tahun	13	31.0	31.0	31.0
11-15 Tahun	4	9.5	9.5	40.5
16-20 Tahun	4	9.5	9.5	50.0
6-10 Tahun	21	50.0	50.0	100.0
Total	42	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Medan yang menjadi responden memiliki masa kerja 6 – 10 tahun yaitu sebanyak 21 orang atau sebesar 50.0% dari total responden.

2. Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian ini 3 (tiga) variabel bebas yaitu partisipasi anggaran, evaluasi anggaran dan sistem pelaporan, serta 1 (satu) variabel terikat yaitu akuntabilitas. Dalam penyebaran angket, masing-masing butir pernyataan dari setiap variabel harus di isi oleh responden yang berjumlah 42 orang. Jawaban angket disediakan dalam 5 alternatif jawaban, yaitu:

- a. Sangat Setuju (SS) dengan skor 5
- b. Setuju (S) dengan skor 4
- c. Netral (N) dengan skor 3
- d. Tidak Setuju (TS) dengan skor 2
- e. Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1

Adapun jawaban-jawaban dari responden yang diperoleh akan ditampilkan pada tabel-tabel berikut:

a. Variabel X₁ (Partisipasi Anggaran)

Berikut ini adalah deskripsi variabel penelitian mengenai partisipasi anggaran yaitu:

Tabel 4.5
Saya memiliki pengaruh yang kuat terhadap proses penyusunan rencana anggaran.
Pernyataan X1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	2	4.8	4.8	4.8
Netral	13	31.0	31.0	35.7
Setuju	21	50.0	50.0	85.7
Sangat Setuju	6	14.3	14.3	100.0
Total	42	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang (14.3%), setuju sebanyak 21 orang (50.0%), netral sebanyak 13 orang (47,7%) dan sebanyak 2 orang (4.8%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 21 orang (50.0%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa saya memiliki pengaruh yang kuat terhadap proses penyusunan rencana anggaran.

Tabel 4.6
Dalam penyusunan anggaran, program, dan kegiatan semua pihak ikut dilibatkan.

Pernyataan X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	24	57.1	57.1	57.1
	Setuju	15	35.7	35.7	92.9
	Sangat Setuju	3	7.1	7.1	100.0
	Total	42	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 orang (7.1%), setuju sebanyak 15 orang (35.7%) dan sebanyak 24 orang (57.1%) responden yang menyatakan netral. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan netral sebanyak 24 orang (57.1%). Jadi dapat disimpulkan responden netral bahwa dalam penyusunan anggaran, program, dan kegiatan semua pihak ikut dilibatkan.

Tabel 4.7
Saya diberikan banyak kesempatan untuk ikut dalam penyusunan anggaran.

Pernyataan X1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	2	4.8	4.8	4.8
Netral	21	50.0	50.0	54.8
Setuju	18	42.9	42.9	97.6
Sangat Setuju	1	2.4	2.4	100.0
Total	42	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang (2.4%), setuju sebanyak 18 orang (42.9%), netral sebanyak 21 orang (50.0%) dan sebanyak 2 orang (4.8%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan netral sebanyak 21 orang (50.0%). Jadi dapat disimpulkan responden netral bahwa saya diberikan banyak kesempatan untuk ikut dalam penyusunan anggaran.

Tabel 4.8
Saya memberikan banyak informasi dalam pelaksanaan anggaran.

Pernyataan X1.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	1	2.4	2.4	2.4
Netral	13	31.0	31.0	33.3
Setuju	25	59.5	59.5	92.9
Sangat Setuju	3	7.1	7.1	100.0
Total	42	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 orang (7.1%), setuju sebanyak 25 orang (59.5%), netral sebanyak 13 orang (31.0%) dan sebanyak 1 orang (2.4%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling

banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 25 orang (59.5%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa saya memberikan banyak informasi dalam pelaksanaan anggaran.

Tabel 4.9
Kontribusi semua pihak terhadap partisipasi anggaran sangat besar.
Pernyataan X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	18	42.9	42.9	42.9
	Setuju	23	54.8	54.8	97.6
	Sangat Setuju	1	2.4	2.4	100.0
	Total	42	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang (2.4%), setuju sebanyak 23 orang (54.8%) dan sebanyak 18 orang (42.9%) responden yang menyatakan netral. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 23 orang (54.8%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa kontribusi semua pihak terhadap partisipasi anggaran sangat besar.

b. Variabel X₂ (Evaluasi Anggaran)

Berikut ini adalah deskripsi variabel penelitian mengenai evaluasi anggaran yaitu:

Tabel 4.10
Setiap OPD membuat laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi.
Pernyataan X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	14	33.3	33.3	33.3
	Setuju	24	57.1	57.1	90.5
	Sangat Setuju	4	9.5	9.5	100.0
	Total	42	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang (9.5%), setuju sebanyak 24 orang (57.1%) dan sebanyak 14 orang (33.3%) responden yang menyatakan netral. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 24 orang (57.1%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa setiap OPD membuat laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi.

Tabel 4.11
Adanya evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan.
Pernyataan X2.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	5	11.9	11.9	11.9
Netral	16	38.1	38.1	50.0
Setuju	17	40.5	40.5	90.5
Sangat Setuju	4	9.5	9.5	100.0
Total	42	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang (9.5%), setuju sebanyak 17 orang (40.5%), netral sebanyak 16 orang (38.1%) dan sebanyak 5 orang (11.9%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 17 orang (40.5%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa adanya evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel 4.12
Pimpinan saya merasa puas dengan penjelasan saya atas penyimpangan
anggaran dalam unit kerja saya.

Pernyataan X2.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	2	4.8	4.8	4.8
Netral	17	40.5	40.5	45.2
Setuju	17	40.5	40.5	85.7
Sangat Setuju	6	14.3	14.3	100.0
Total	42	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang (14.3%), setuju sebanyak 17 orang (40.5%), netral sebanyak 17 orang (40.5%) responden yang menyatakan ragu-ragu. dan sebanyak 2 orang (4.8%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju dan netral sebanyak 17 orang (40.5%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju dan netral bahwa pimpinan saya merasa puas dengan penjelasan saya atas penyimpangan anggaran dalam unit kerja saya.

Tabel 4.13
Pimpinan saya membicarakan kepada saya mengenai peningkatan pekerjaan
untuk memenuhi tujuan RKA.

Pernyataan X2.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	2	4.8	4.8	4.8
Tidak Setuju	3	7.1	7.1	11.9
Netral	9	21.4	21.4	33.3
Setuju	22	52.4	52.4	85.7
Sangat Setuju	6	14.3	14.3	100.0
Total	42	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang (14.3%), setuju sebanyak 22 orang

(52.4%), netral sebanyak 9 orang (21.4%), tidak setuju sebanyak 3 orang (7.1%) dan sebanyak 2 orang (4.8%) responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 22 orang (52.4%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa pimpinan saya membicarakan kepada saya mengenai peningkatan pekerjaan untuk memenuhi tujuan RKA.

Tabel 4.14
Pimpinan saya akan menunjukkan ketidakpuasannya mengenai anggaran unit kerja saya bila tidak tercapai.
Pernyataan X2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	4	9.5	9.5	9.5
	Netral	15	35.7	35.7	45.2
	Setuju	12	28.6	28.6	73.8
	Sangat Setuju	11	26.2	26.2	100.0
	Total	42	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 11 orang (26.2%), setuju sebanyak 12 orang (28.6%), netral sebanyak 15 orang (35.7%), dan sebanyak 4 orang (9.5%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan netral sebanyak 15 orang (35.7%). Jadi dapat disimpulkan responden netral bahwa pimpinan saya akan menunjukkan ketidakpuasannya mengenai anggaran unit kerja saya bila tidak tercapai.

c. Variabel X₃ (Sistem Pelaporan)

Berikut ini adalah deskripsi variabel penelitian mengenai sistem pelaporan yaitu:

Tabel 4.15
Adanya pembuatan laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran yang terjadi.

Pernyataan X3.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	2	4.8	4.8	4.8
Tidak Setuju	15	35.7	35.7	40.5
Netral	10	23.8	23.8	64.3
Setuju	5	11.9	11.9	76.2
Sangat Setuju	10	23.8	23.8	100.0
Total	42	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 10 orang (23.8%), setuju sebanyak 5 orang (11.9%), netral sebanyak 10 orang (23.8%), tidak setuju sebanyak 15 orang (35.7%) dan sebanyak 2 orang (4.8%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan tidak setuju sebanyak 15 orang (35.7%). Jadi dapat disimpulkan responden tidak setuju bahwa adanya pembuatan laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran yang terjadi.

Tabel 4.16
Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pernyataan X3.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	1	2.4	2.4	2.4
Netral	16	38.1	38.1	40.5
Setuju	19	45.2	45.2	85.7
Sangat Setuju	6	14.3	14.3	100.0
Total	42	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang (14.3%), setuju sebanyak 19 orang

(45.2%), netral sebanyak 16 orang (38.1%) dan sebanyak 1 orang (2.4%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 19 orang (45.2%). Jadi dapat disimpulkan responden menyatakan setuju bahwa Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Tabel 4.17
Kejelasan dalam pencatatan penggunaan anggaran yang digunakan haruslah jelas dan terperinci.
Pernyataan X3.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	6	14.3	14.3	14.3
Netral	13	31.0	31.0	45.2
Setuju	13	31.0	31.0	76.2
Sangat Setuju	10	23.8	23.8	100.0
Total	42	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 10 orang (23.8%), setuju sebanyak 13 orang (31.0%), netral sebanyak 13 orang (31.0%) dan sebanyak 6 orang (14.3%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju dan netral sebanyak 13 orang (31.0%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju dan netral bahwa kejelasan dalam pencatatan penggunaan anggaran yang digunakan haruslah jelas dan terperinci.

Tabel 4.18
Sistem pelaporan memperhatikan ketepatan waktu dalam pembuatan laporan secara periodik.
Pernyataan X3.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	1	2.4	2.4	2.4
Tidak Setuju	4	9.5	9.5	11.9
Netral	9	21.4	21.4	33.3
Setuju	18	42.9	42.9	76.2
Sangat Setuju	10	23.8	23.8	100.0
Total	42	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 10 orang (23.8%), setuju sebanyak 18 orang (42.9%), netral sebanyak 9 orang (21.4%), tidak setuju sebanyak 4 orang (9.5%) dan sebanyak 1 orang (2.4%) responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 18 orang (42.9%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa sistem pelaporan memperhatikan ketepatan waktu dalam pembuatan laporan secara periodik.

Tabel 4.19
Laporan pelaksanaan kegiatan diterbitkan secara rutin setiap bulannya.
Pernyataan X3.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	1	2.4	2.4	2.4
Netral	14	33.3	33.3	35.7
Setuju	16	38.1	38.1	73.8
Sangat Setuju	11	26.2	26.2	100.0
Total	42	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Berdasarkan tabel 4.19 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 11 orang (26.2%), setuju sebanyak 16 orang

(38.1%), netral sebanyak 14 orang (33.3%) dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju 1 orang (2.4%). Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 16 orang (38.1%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa laporan pelaksanaan kegiatan diterbitkan secara rutin setiap bulannya.

d. Variabel Y (Akuntabilitas)

Berikut ini adalah deskripsi variabel penelitian mengenai akuntabilitas yaitu:

Tabel 4.20
Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.
Pernyataan Y.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	14	33.3	33.3	33.3
Setuju	21	50.0	50.0	83.3
Sangat Setuju	7	16.7	16.7	100.0
Total	42	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Berdasarkan tabel 4.20 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 7 orang (16.7%), setuju sebanyak 21 orang (50.0%) dan sebanyak 14 orang (33.3%) responden yang menyatakan netral. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 21 orang (50.0%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.

Tabel 4.21
Anggaran yang dirancang dan ditetapkan pemerintah daerah bersama
DPRD sesuai dengan realisasinya bagi kepentingan publik.
Pernyataan Y.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	6	14.3	14.3	14.3
Netral	16	38.1	38.1	52.4
Setuju	14	33.3	33.3	85.7
Sangat Setuju	6	14.3	14.3	100.0
Total	42	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Berdasarkan tabel 4.21 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang (14.3%), setuju sebanyak 14 orang (33.3%), netral sebanyak 16 orang (38.1%) dan sebanyak 6 orang (14.3%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan tidak setuju sebanyak 16 orang (14.3%). Jadi dapat disimpulkan responden tidak setuju bahwa anggaran yang dirancang dan ditetapkan pemerintah daerah bersama DPRD sesuai dengan realisasinya bagi kepentingan publik.

Tabel 4.22
Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi.
Pernyataan Y.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	14	33.3	33.3	33.3
Setuju	20	47.6	47.6	81.0
Sangat Setuju	8	19.0	19.0	100.0
Total	42	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Berdasarkan tabel 4.22 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang (19.0%), setuju sebanyak 20 orang (47.6%) dan sebanyak 14 orang (33.3%) responden yang menyatakan netral. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan

setuju sebanyak 20 orang (47.6%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi..

Tabel 4.23
Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program.
Pernyataan Y.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	5	11.9	11.9	11.9
Netral	4	9.5	9.5	21.4
Setuju	27	64.3	64.3	85.7
Sangat Setuju	6	14.3	14.3	100.0
Total	42	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Berdasarkan tabel 4.23 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang (14.3%), setuju sebanyak 27 orang (64.3%), netral sebanyak 4 orang (9.5%) dan sebanyak 5 orang (11.9%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 27 orang (64.3%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program.

Tabel 4.24
Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan.
Pernyataan Y.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	6	14.3	14.3	14.3
Setuju	30	71.4	71.4	85.7
Sangat Setuju	6	14.3	14.3	100.0
Total	42	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Berdasarkan tabel 4.24 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang (14.3%), setuju sebanyak 30 orang

(71.4%) dan sebanyak 6 orang (14.3%) responden yang menyatakan netral. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 30 orang (71.4%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan.

3. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

a. Pengujian Validitas

Untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam daftar pertanyaan (angket) yang telah disajikan pada responden maka perlu dilakukan uji validitas. Apabila validitas setiap pertanyaan lebih besar ($>$) 0,30, maka butir pertanyaan dianggap valid (Rusiadi, 2013).

Tabel 4.25
Uji Validitas (X_1) Partisipasi Anggaran
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan X1.1	14.2381	3.161	.476	.701
Pernyataan X1.2	14.4762	3.085	.700	.605
Pernyataan X1.3	14.5476	3.327	.576	.656
Pernyataan X1.4	14.2619	3.710	.381	.728
Pernyataan X1.5	14.3810	3.949	.372	.728

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Dari tabel 4.25 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 5 (lima) butir pertanyaan pada variabel partisipasi anggaran dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Tabel 4.26
Uji Validitas (X₂) Evaluasi Anggaran
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan X2.1	14.4762	6.451	.463	.666
Pernyataan X2.2	14.7619	5.796	.447	.663
Pernyataan X2.3	14.5952	6.198	.371	.692
Pernyataan X2.4	14.5952	4.735	.603	.589
Pernyataan X2.5	14.5238	5.280	.463	.660

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Dari tabel 4.26 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 5 (lima) butir pertanyaan pada variabel evaluasi anggaran dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Tabel 4.27
Uji Validitas (X₃) Sistem Pelaporan
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan X3.1	15.0000	8.146	.534	.797
Pernyataan X3.2	14.4286	10.397	.572	.774
Pernyataan X3.3	14.5000	9.085	.590	.762
Pernyataan X3.4	14.3810	8.925	.622	.751
Pernyataan X3.5	14.2619	9.418	.700	.736

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Dari tabel 4.27 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 5 (lima) butir pertanyaan pada variabel sistem pelaporan dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Tabel 4.28
Uji Validitas (Y) Akuntabilitas
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan Y.1	15.1429	5.296	.808	.743
Pernyataan Y.2	15.5000	4.646	.728	.763
Pernyataan Y.3	15.1190	6.254	.444	.840
Pernyataan Y.4	15.1667	5.215	.645	.788
Pernyataan Y.5	14.9762	6.512	.565	.814

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Dari tabel 4.28 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 5 (lima) butir pertanyaan pada variabel akuntabilitas dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

b. Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Butir angket dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap angket adalah konsisten. Dalam penelitian ini untuk menentukan angket reliabel atau tidak dengan menggunakan *alpha cronbach*. Angket dikatakan reliabel jika *alpha cronbach* > 0,60 dan tidak reliabel jika sama dengan atau dibawah 0,60.

Reliabilitas dari pertanyaan angket yang telah diajukan penulis kepada responden dalam penelitian ini akan terlihat pada tabel *Reliability Statistics* yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.29
Uji Reliabilitas (X₁) Partisipasi Anggaran
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.733	5

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Dari tabel 4.29 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,733 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 5 butir pernyataan pada variabel partisipasi anggaran adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 4.30
Uji Reliabilitas (X₂) Evaluasi Anggaran
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.705	5

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Dari tabel 4.30 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,705 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 5 butir pernyataan pada variabel evaluasi anggaran adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 4.31
Uji Reliabilitas (X₃) Sistem Pelaporan
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.801	5

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Dari tabel 4.31 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,801 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan

yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 5 butir pernyataan pada variabel sistem pelaporan adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 4.32
Uji Reliabilitas (Y) Akuntabilitas
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.827	5

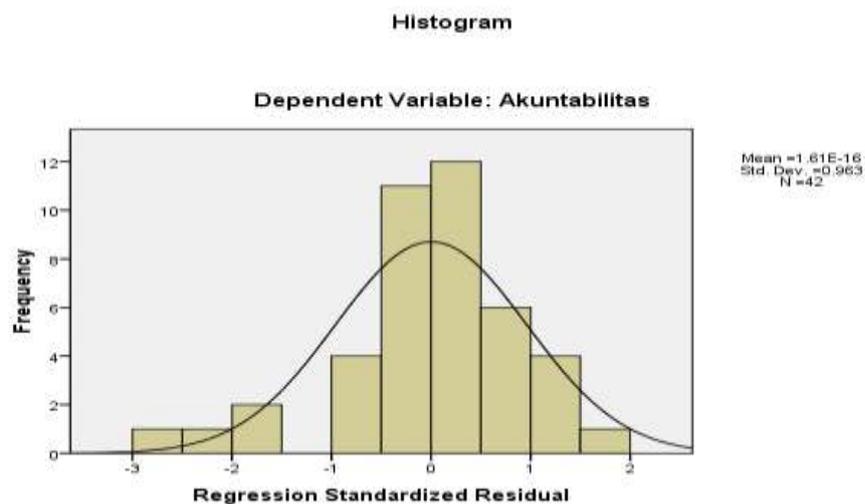
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Dari tabel 4.32 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,827 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 5 butir pernyataan pada variabel akuntabilitas adalah reliabel atau dikatakan handal.

4. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik distribusi data normal atau mendekati normal.

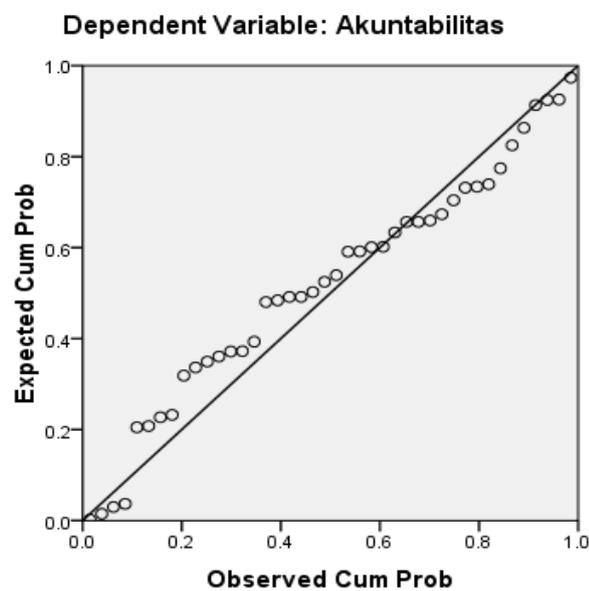


Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, hasil pengujian normalitas data diketahui bahwa data telah berdistribusi secara normal, dimana gambar histogram memiliki garis membentuk lonceng dan memiliki kecembungan seimbang ditengah.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Gambar 4.2 P -P Plot Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas, kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data yang menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal.

Dari kedua gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan uji normalitas data, data untuk variabel akuntabilitas berdistribusi secara normal.

Untuk lebih memastikan apakah data disepanjang garis diagonal tersebut berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji Kolmogorov Smirnov (1 Sample KS) yakni dengan melihat data residualnya apakah distribusi normal atau tidak. Jika nilai Asym.sig (2-tailed) > taraf nyata ($\alpha = 0.05$) maka data residual berdistribusi normal.

Tabel 4.33
Uji Normalitas *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.88369411
Most Extreme Differences	Absolute	.123
	Positive	.086
	Negative	-.123
Kolmogorov-Smirnov Z		.794
Asymp. Sig. (2-tailed)		.554

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Pada tabel 4.33 di atas, dapat dilihat bahwa hasil pengolahan data tersebut, besar nilai signifikansi *kolmogorov Smirnov* sebesar 0,554 maka dapat disimpulkan data terdistribusi secara normal, dimana nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 ($p = 0,554 > 0,05$).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai

tolerance value > 0,10 atau VIF < 10 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Multikolinieritas dari hasil angket yang telah didistribusikan kepada responden dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.34
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error			Tolerance	VIF
1(Constant)	1.624	2.818	.576	.568		
Partisipasi Anggaran	.257	.142	3.807	.009	.916	1.092
Evaluasi Anggaran	.533	.133	4.014	.000	.639	1.565
Sistem Pelaporan	.166	.104	3.602	.018	.635	1.574

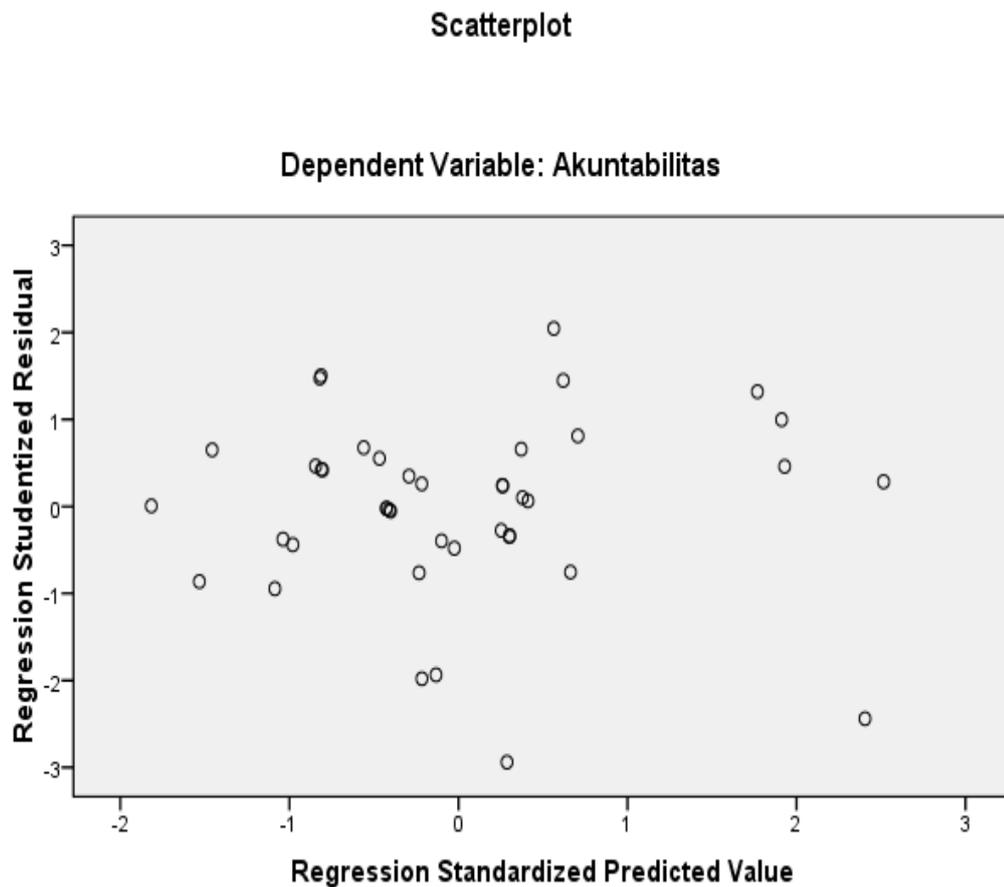
a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Berdasarkan Tabel 4.34 di atas dapat dilihat bahwa angka *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10 antara lain adalah partisipasi anggaran $1,092 < 10$, evaluasi anggaran $1,565 < 10$ dan sistem pelaporan $1,574 < 10$, dan nilai *Tolerance* partisipasi anggaran $0,916 > 0,10$, evaluasi anggaran $0,639 > 0,10$ dan sistem pelaporan $0,635 > 0,10$ sehingga terbebas dari multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedasitas.



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Gambar 4.3 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.3 di atas, gambar *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu. Gambar di atas juga menunjukkan bahwa sebaran data ada di sekitar titik nol. Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas, dengan perkataan lain: variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini bersifat homoskedastisitas.

5. Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda bertujuan menghitung besarnya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat.

Tabel 4.35
Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.624	2.818	.576	.568		
Partisipasi Anggaran	.257	.142	3.807	.009	.916	1.092
Evaluasi Anggaran	.533	.133	4.014	.000	.639	1.565
Sistem Pelaporan	.166	.104	3.602	.018	.635	1.574

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Berdasarkan tabel 4.35 tersebut diperoleh regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 1,624 + 0,257 X_1 + 0,533 X_2 + 0,166 X_3 + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

- Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap nol maka nilai akuntabilitas (Y) adalah sebesar 1,624.
- Jika terjadi peningkatan partisipasi anggaran 1, maka akuntabilitas (Y) akan meningkat sebesar 0,257.
- Jika terjadi peningkatan evaluasi anggaran sebesar 1, maka akuntabilitas (Y) akan meningkat sebesar 0,533.
- Jika terjadi peningkatan sistem pelaporan sebesar 1, maka akuntabilitas (Y) akan meningkat sebesar 0,166.

6. Uji Kesesuaian (*Test Goodness Of Fit*)

a. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F (uji simultan) dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara simultan. Cara yang digunakan adalah dengan melihat *level of significant* ($=0,05$). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel 4.36
Uji Simultan
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	197.496	3	65.832	17.196	.000^a
Residual	145.480	38	3.828		
Total	342.976	41			

a. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran

b. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Berdasarkan tabel 4.36 di atas dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 17,196 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,85 yang dapat dilihat pada $\alpha = 0,05$ (lihat lampiran tabel F). Probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$, maka model regresi dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini partisipasi anggaran, evaluasi anggaran, dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Maka hipotesis sebelumnya adalah Terima H_a (tolak H_0) atau hipotesis diterima.

b. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji Parsial (t) menunjukkan seberapa jauh variabel bebas secara individual menerangkan variasi pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%.

Tabel 4.37
Uji Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.624	2.818	.576	.568		
	Partisipasi Anggaran	.257	.142	3.807	.009	.916	1.092
	Evaluasi Anggaran	.533	.133	4.014	.000	.639	1.565
	Sistem Pelaporan	.166	.104	3.602	.018	.635	1.574

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Berdasarkan tabel 4.37 diatas dapat dilihat bahwa:

- 1) Pengaruh partisipasi anggaran terhadap akuntabilitas.

Hasil menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 3,807 sedangkan t_{tabel} sebesar 2,024 dan signifikan sebesar 0,009, sehingga $t_{hitung} 3,807 > t_{tabel} 2,024$ dan signifikan $0,009 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan partisipasi anggaran berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas.

- 2) Pengaruh evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas.

Hasil menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 4,014 sedangkan t_{tabel} sebesar 2,024 dan signifikan sebesar 0,000, sehingga $t_{hitung} 4,014 > t_{tabel} 2,024$ dan signifikan $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan evaluasi anggaran berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas.

- 3) Pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas.

Hasil menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 3,602 sedangkan t_{tabel} sebesar 2,024 dan signifikan sebesar 0,018, sehingga $t_{hitung} 3,602 > t_{tabel} 2,024$ dan signifikan $0,018 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak,

yang menyatakan sistem pelaporan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui persentase besarnya variasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.38
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.759 ^a	.576	.542	1.95664

a. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran

b. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0,2019

Berdasarkan tabel 4.38 di atas dapat dilihat bahwa angka *Adjusted R Square* 0,542 yang dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 54,2% akuntabilitas dapat diperoleh dan dijelaskan oleh partisipasi anggaran, evaluasi anggaran, dan sistem pelaporan. Sedangkan sisanya $100\% - 54,2\% = 45,8\%$ dijelaskan oleh faktor lain atau variabel diluar model, seperti struktur desentralisasi, tujuan anggaran dan lain-lain.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pada Pemerintah Kota Medan

Partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hevyana

(2015), yang menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas. Penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi anggaran menggambarkan keterlibatan pemimpin pusat pertanggungjawaban mulai dari tingkat bawah, menengah dan tingkat atas dalam proses penyusunan anggaran. Keterlibatan para pemimpin ini sangat penting dalam upaya memotivasi mereka guna mencapai tujuan pemerintahan agar dapat meningkatkan akuntabilitas.

2. Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pada Pemerintah Kota Medan

Evaluasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hevyana Naipospos (2015), yang menunjukkan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas. Penelitian ini menyatakan bahwa pentingnya juga aspek evaluasi anggaran diterapkan dalam rangka untuk melakukan prospektif yang berkaitan dengan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari penggunaan anggaran yang dikelola oleh pimpinan. Hasil evaluasi juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang perimbangan anggaran, alokasi anggaran dan berbagai pengawasan subsidi anggaran yang diperuntukkan kepada pimpinan agar dapat meningkatkan akuntabilitas.

3. Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Pada Pemerintah Kota Medan

Sistem pelaporan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Meria Solina (2015), yang menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas. Penelitian ini menyatakan bahwa sistem pelaporan merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran tersebut dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas.

4. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas

Hasil menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar 17,196 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,85 yang dapat dilihat pada $\alpha = 0,05$ (lihat lampiran tabel F). Probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$, maka model regresi dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini partisipasi anggaran, evaluasi anggaran, dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pada SKPD Kota Medan.
2. Evaluasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pada SKPD Kota Medan
3. Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pada SKPD Kota Medan.
4. Partisipasi anggaran, evaluasi anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pada SKPD Kota Medan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dimukakan diatas, maka dapat disebutkan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi SKPD Kota Medan agar dalam penyusunan anggaran, program, dan kegiatan semua pihak harus ikut dilibatkan.
2. Bagi SKPD Kota Medan harus memperhatikan evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

3. Bagi SKPD Kota Medan harus melakukan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
4. Bagi SKPD Kota Medan agar anggaran yang dirancang dan ditetapkan pemerintah daerah bersama DPRD sesuai dengan realisasinya bagi kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2002. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Atmosoeprpto, Kisdarto. (2012). Menuju SDM Berdaya – Dengan Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Djalil, Rizal. (2014). Akuntabilitas Keuangan Daerah, implementasi Pasca Reformasi. Edisi 1. Jakarta: Semester Rakyat Merdeka.
- Erlina. (2011). *Metodologi Penelitian*, USU Press, Medan
- Ghozali. (2010). “*Aplikasi analisis Multivariate Dengan Program SPSS*”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2012). *Managemen Keuangan Sektor Publik*, Yogyakarta: Salemba Empat
- Hidayat, R. Rusiadi, dan M. Isa Indrawan. 2014. Teknik Proyeksi Bisnis. USU Press. Medan
- Hidayat, R., & Subiantoro, N. Rusiadi. 2013. Metode Penelitian. USU Press. Medan
- Sjaifudian, Hetifah. (2008). *Panduan Analisis dan Advokasi Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Makassar : Pattiro
- Kennis, (2011). *Effect on Budgetary Good Characteristic on Managerial Attitude and Performance*. The Accounting review.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kelima. Penerbit andi Yogyakarta
- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi offset
- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga*, Jakarta: Salemba Empat
- Nazaruddin. (2008). *Penyusunan Anggaran Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Rivai. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Edisi ke 6, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 16956.
- Rakhmat. (2017). *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Sanotoso, Slamet. (2012). *Statiska Ekonomi Plus Aplikasi SPSS*. Ponorogo : Umpo Press

Stephen, Marry. (2012). *Manajemen*, dialihbahasakan oleh T. Hermaya dan Harry Slamet, Edisi Ketujuh, PT Indeks Group Gramedia, Jakarta

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Bandung: CV Alfabeta

JURNAL :

Abdul, Latif. (2014). *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Dan Karakteristik Terhadap Akuntabilitas Aparat Pemerintah Kabupaten Gorontalo*. Jurnal Al-Buhuts, Volume. 10 Nomor 1

Adil, E., Nasution, M. D. T. P., Samrin, S., & Rossanty, Y. (2017). *Efforts to Prevent the Conflict in the Succession of the Family Business Using the Strategic Collaboration Model*. Business and Management Horizons, 5(2), 49-59

Andika, R. (2019). *Pengaruh Motivasi Kerja dan Persaingan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening Pada Pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan*. JUMANT, 11(1), 189-206.

Ardian, N. (2019). *Pengaruh Insentif Berbasis Kinerja, Motivasi Kerja, Dan Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai UNPAB*. JEpa, 4(2), 119-132.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". Jurnal Sumatera Law Review, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Darlis. (2012). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Riau)*.

Fladimir, Edwin. (2014). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Sistem pelaporan, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Akuntabilitas Aparat Pemerintah Daerah Yogyakarta*

Falikhathun. (2009). "Pengaruh Budaya Organisasi, Locus of Control, dan penerapan sistem informasi terhadap Kinerja Aparatur". Jurnal Empirika. UNS

Febrina, A. (2019). *Motif Orang Tua Mengunggah Foto Anak Di Instagram (Studi Fenomenologi Terhadap Orang Tua di Jabodetabek)*. Jurnal Abdi Ilmu, 12(1), 55-65.

Hevyana, Naipospos. (2015). *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Pekanbaru)*

Hidayat, R. (2018). *Kemampuan Panel Auto Regressiv Distributed Lag Dalam Memprediksi Fluktuasi Saham Property And Real Estate Indonesia*. JEpa, 3(2), 133-149.

- Husni, Yuanita. (2017). *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kepuasan Kerja, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial di Pemerintah Kota Medan*
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). *UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index*. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Kurnia, Ratnawati. (2012). Pengaruh Budgetary Goal Characteristics terhadap Kinerja Manajerial dengan Budaya Paternalistik dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi VII*. Bali.
- Malikhah, I. (2019). *Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi*. *Jumant*, 11(1), 67-80.
- Mayuraa. (2014). *Pengaruh Kejelasan Dan Tujuan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Aparat Pemerintah Gorontalo*
- Meria, Solina. (2015). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Sistem pelaporan Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Akuntabilitas Pada Skpd Kota Tanjungpinang*
- Munawar, 2006. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Perilaku, Sikap dan Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang sesuai SNA 9 Kota Padang*
- Nasution, A. P. (2019). Implementasi e-budgeting sebagai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah daerah kota binjai. *Jurnal akuntansi bisnis dan publik*, 9(2), 1-13.
- Nasution, M. D. T. P., & Rossanty, Y. (2018). *Country of origin as a moderator of halal label and purchase behaviour*. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12(2).
- Nurchayani, Kunwawiyah. (2010). *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Organisasi dan Persepsi Inovasi Sebagai Variabel Intervening*
- Pramono, C. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Harga Obligasi Perusahaan Keuangan Di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 62-78.
- Purba, R. B. (2018). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas Pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada badan keuangan daerah kabupaten tanah datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Reni, Yulianti. (2008). *Pengaruh Sistem pelaporan, Kesulitan Sasaran Anggaran Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. *Jurnal Akuntansi*

- Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching*. International Journal of Business and Management Invention, 6(1), 73079.
- Siregar, N. (2018). *Pengaruh Pencitraan, Kualitas Produk dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan pada Rumah Makan Kampoeng Deli Medan*. JUMANT, 8(2), 87-96.
- Supriyono R.A. 2004. "Pengaruh Variabel Intervening Kecukupan Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 19. Pp 282 – 298
- Wibawa, Harry. (2010). *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (studi empiris pada DPKAD dan Inspektorat Kota Bandung)*
- Yanti, E. D., & Sanny, A. *The Influence of Motivation, Organizational Commitment, and Organizational Culture to the Performance of Employee Universitas Pembangunan Panca Budi*.

PERATURAN PERUNDANGAN :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

BIODATA

Nama : Syahna Zatira
NPM : 1415100050
Fakultas/Program Studi : Social Sains / Akuntansi
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 23 Juni 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jln. Sei mencirim Komplek lalang
Greenland II Blok F No.1-A
No. Hp : 0823 6555 4602
Anak ke : 2 dari 3 bersaudara
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenjang Pendidikan : SD Swasta Perguruan Panca Budi Medan
SMP Swasta Perguruan Panca Budi Medan
SMK Negeri 8 Medan
Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan 2014 s/d 2019